

Keadilan Iklim Menjawab Perubahan Iklim
The Indonesia Civil Society Forum on Climate Justice

“Biasanya kami memperkirakan awal datangnya musim angin barat dan angin timur dengan membaca posisi bintang 'selatan' yang berbentuk pari. Tetapi, sekarang posisi bintang tidak bisa menjadi pedoman lagi karena sekarang masuknya musim angin barat dan timur tidak sesuai lagi dengan posisi bintang. Saat ini awal musim angin barat dan angin timur sudah tidak lagi teratur, ini sangat menyulitkan nelayan yang akan turun melaut,” tutur Haryadi, nelayan Krui Lampung Barat, disampaikan pada Sarasehan Iklim Oktober 2009.

Penggalan cerita tersebut hanya satu di antara puluhan, bahkan ratusan cerita mengenai bagaimana masyarakat yang hidup tergantung dengan alam menjadi semakin terdesak. Alam yang berubah telah membuat permasalahan yang dihadapi oleh petani, nelayan, masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dan masyarakat adat menjadi semakin runyam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa alam berubah dimulai dari zaman revolusi industri dibarengi dengan pola pengelolaan sumber daya alam serta pola pembangunan yang eksploitatif. Keterdesakan bagi masyarakat bertambah ketika pemerintah minim melakukan tindakan preventif yang diperlukan. Proses pembiaran ini menjadikan warga kian sulit.

Nelayan dipaksa untuk beradaptasi menggunakan mesin kapal mereka yang berukuran kecil dan petani dipaksa untuk menggunakan pompa air karena tidak ada air yang bisa mengairi sawah mereka. Dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia disebutkan bahwa hanya 20% masyarakat Indonesia yang memperoleh air bersih (HDR 2009, UNDP, <http://hdrstats.undp.org>). Gambaran tersebut hanya sebagian kecil dari krisis yang dihadapi oleh masyarakat selama ini. Belum lagi soal krisis energi, krisis pangan, krisis tata kelola, dan daftar deret krisis lainnya. Uniknya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,2% dibandingkan tahun 2008 lalu (BPS, 2009).

Tunggakan masalah

Kondisi krisis sumber daya alam bukanlah cerita baru di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan kelautan terbesar di dunia yang memiliki anugerah sumber daya alam yang beraneka ragam, mulai tutupan hutan yang luas hingga sumber daya agraria yang mudah ditumbuhi. Ketidakmampuan mengelola sumber daya alam demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya menjadikan Indonesia tertinggal dalam banyak hal dengan negara-negara lainnya. Perubahan iklim kian memperburuk kondisi yang dihadapi Indonesia.

Bagaimana petani-petani di Pantai Utara Jakarta (Pantura) merespons kelangkaan air dengan menjebol saluran irigasi dan merusak pintu air untuk mengairi sawahnya, karena musim kemarau yang lebih panjang saat Elnino dan bagaimana sawah di Pantura terancam banjir saat La Nina? Hal ini terjadi tidak terlepas dari “pembangunan” yang menggunakan tata ruang karet, sesuai kepentingan, sehingga terus terjadi konversi lahan hutan Jawa Barat menjadi peruntukan lain, seperti perumahan dan perindustrian secara tidak terkendali. Bagaimana Petani-petani di Jawa Timur membuat sumur pompa dalam, yaitu menghisap cadangan air tanah dalam yang terkumpul dalam cekungan air tanah, sedangkan air tersebut terkumpul dalam cekungan air tanah melalui proses ratusan tahun dari siklus alam yang normal? Bagaimana dukungan Pemda Jawa Timur pada kegiatan pemompaan sumur pompa dalam, yang lebih terlihat sebagai respon reaktif untuk mempertahankan surplus produksi berasnya? Bagaimana nelayan-nelayan kita terhambat pola angin timur dan barat yang sudah berubah dan bagaimana mereka mengakali penggunaan solar yang mahal dengan minyak tanah yang sekarang juga langka dan akan dicabut subsidiya kelak?

Petani kita yang populasinya sekitar 21 juta KK dan nelayan kita yang populasinya 14,58 juta atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia yang hidup dalam keserbakurangan, makin terdesak kehidupannya karena menerima akumulasi dampak, mulai dampak kebijakan yang tidak berpihak, dampak mahalnya pemenuhan kebutuhan hidup dan dampak yang paling baru adalah dampak perubahan iklim global. Semakin berat mempertahankan kehidupan layak di pedesaan pertanian maupun perikanan, akan melahirkan urbanisasi masif yang kemudian melahirkan komunitas miskin kota. Pengangguran di pedesaan dan perkotaan yang meningkat kemudian melahirkan migrasi keluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berjudi dengan nasib dan keberuntungan di luar negeri. Itu semua adalah respon warga untuk sekedar bertahan hidup, mengorbankan keharmonisan hidup dalam komunitas asalnya dan menjajagi perjuangan hidup ditempat lain. Dengan tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah, mereka menggadaikan ke Indonesiaannya sebagai tenaga kasar yang tereksplotasi dan mengirimkan hasil keringatnya ke kampung masing-masing. Mengapa perbankan dalam negeri meningkat keuntungannya dan bergaya mewah manajemennya, mengikuti pola Negara maju, sedangkan uang yang beredar di kampung-kampung sangat minim, bahkan tingkat suku bunga pinjaman pertanian/usaha kecil cukup tinggi, sekitar 16%?

Daerah timur Indonesia mengalami kondisi salah urus pengelolaan sumber daya. Krisis air yang terjadi saat ini disebabkan oleh pola pembagian “industri” air yang tidak merata. Di samping itu pola impor dari luar NTT membuat produksi beras lokal menjadi kalah saing. 82% beras yang beredar di NTT berasal dari impor. Padahal NTT pada dasarnya adalah daerah penghasil beras. Hal ini juga yang pada akhirnya menyebabkan sumber daya manusia (pemuda/i) di NTT tidak banyak yang memilih untuk menjadi petani dan lebih memilih untuk menjadi TKI dan tukang ojek.

Berbeda dengan NTT pesona bahari yang spektakuler di wilayah Sulawesi menjadi perhatian dunia dalam tahun ini. Pulau ini menjadi tempat diselenggarakannya world ocean confrence (WOC) tahun ini, dan menghasilkan deklarasi menado. Namun pertemuan tersebut tidak menjawab permasalahan mendasar yang dihadapi oleh hampir 68,7% yang mendiami teluk tomini adalah nelayan tradisional dan 40 % lebih itu masyarakat Bajo yang mendiami Teluk Tomini.

Karena alokasi pendanaan social pemerintah lebih menitikberatkan kepada penguatan penangkapan ikan dengan menggunakan teknologi tinggi, dan hal tersebut dapat mematikan peran nelayan tradisional.

Dalam konteks hutan, daerah Kalimantan pada dasarnya adalah pulau di Indonesia yang memiliki tutupan hutan yang amat luas, termasuk juga Kalimantan Timur. Namun Kaltim telah melalui fase perusakan hutan yang sangat massif, dan sekarang dilanjutkan dengan perusakan akibat pembukaan areal pertambangan. Saat ini 70% wilayah Kalimantan Timur telah menjadi konsesi pertambangan. Kepentingan masyarakat seringkali dikorbankan untuk kepentingan pembukaan areal pertambangan. Tercatat paling tidak terdapat 5 Desa di Kabupaten Paser Kalimantan Timur tergusur demi peningkatan produksi dari PT.KIDEKO. Dengan luasan gambut sebesar 52.2 % dari total luasan lahan gambut di daratan Kalimantan, maka Kalimantan Tengah menghadapi suatu permasalahan yang cukup besar. Terdapat kurang lebih 600.000 Ha Konversi hutan tanpa izin. Sedangkan yang diberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit terdapat kurang lebih 4,09 jt Ha. Sebagian besarnya, kira-kira 1 jt Ha ada di lahan gambut, sebagian lagi sudah dibuka kurang lebih 1,4 jt Ha dan sekitar 600.000 nya di jadikan taman nasional serta sebagian lagi di buat untuk transmigrasi. Sehingga lahan gambut di Kalimantan Tengah sudah hampir semuanya tereksplotasi.

Begitu juga dengan daerah Riau yang memiliki tutupan hutan yang cukup luas, maka Riau juga memiliki suatu permasalahan yang kompleks di sektor kehutanan. Ditambah lagi dengan skema penurunan emisi dari sektor kehutanan. Terdapat 3 daerah di Riau yang akan dijadikan untuk skema REDD. Namun tidak dibarengi dengan penguatan pemahaman dari masyarakat. Hal ini menyebabkan peluang konflik antara masyarakat dengan pihak yang melaksanakan REDD akan terbuka lebar.

Lain halnya yang terjadi di pulau Jawa. Sebagai pulau yang paling padat di Indonesia, tingkat kerentanan di Jawa amatlah tinggi. Bahkan survei Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) menunjukkan bahwa Jakarta merupakan kota dengan tingkat kerentanan paling tinggi di Asia Tenggara. Pola pembangunan yang salah juga terjadi di berbagai wilayah di pulau Jawa. Bojonegoro menjadi salah satu contoh dimana Pemerintah tidak memberikan pilihan kepada masyarakat ketika terjadi kejadian bencana yang diakibatkan ledakan pipa gas. Sekitar 3000 warga yang menjadi korban terpaksa mengungsi. Hal tersebut juga tidak menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah, namun akan dilanjutkan dengan rencana pemindahan kota, akibat adanya sumber migas di tengah alun-alun kota.

Kondisi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia tersebut semakin mempersempit ruang gerak masyarakat untuk dapat selamat. Masyarakat terus dihadapkan dengan kondisi yang sulit. Diperlukan suatu langkah konkrit dan berani dari pemerintah untuk dapat menjawab beberapa permasalahan tersebut. Keberanian pemerintah untuk dapat mencabut beberapa kebijakan yang tidak adil sangat diperlukan. Selain itu pembenahan sikap dari beberapa sektor juga mutlak untuk dilakukan.

Kaum Perempuan: Penerima dampak ganda atas Perubahan Iklim

Bagaimana kaum perempuan, ibu-ibu, yang harus memikul tanggung jawab lebih berat dalam mempertahankan kehidupan keluarganya, menuai konflik dan paceklik dalam keseharian hidupnya. Bicara mengenai peran perempuan secara sekaligus juga membicarakan keselamatan manusia secara umum. Peran mereka yang sangat besar dalam mengurus kebutuhan domestik menjadikan kaum perempuan menjadi salah satu aktor sentral yang perlu mendapatkan ruang gerak yang cukup.

Kaum perempuan akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti mengantri bahan bakar, mencari sembako murah dan memikul air dari sumber air disekitar wilayah desanya kala air di desanya sudah mengering. Dengan tingginya tingkat kemiskinan, maka perempuan juga harus mengorbankan waktunya lebih banyak untuk bekerja di berbagai sector formal/ informal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Mahalnya biaya pendidikan, kesehatan dan sembako telah memaksa perempuan untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagai suatu tugas yang tidak terpisahkan maka kaum perempuan harus menjaga kesehatan anak-anaknya yang terancam oleh makin buruknya lingkungan sekitar dan perubahan-perubahan cuaca lokal yang meningkatkan resiko serangan penyakit. Kaum perempuan harus menjaga bayinya didalam kandungan dan menyusui balitanya dengan keterbatasan asupan gizi yang bisa diperolehnya, sehingga meningkatkan resiko terganggunya kesehatannya dan bahkan nyawanya sendiri.

Ketidakadilan iklim yang terjadi semakin membuat peran perempuan menjadi semakin terpojok. Sekaligus perhatian pemerintah masih sangat minim terhadap peran perempuan dalam merespon perubahan iklim. Sikap global yang semakin tidak adil

Dengan kondisi yang tergambar di atas, aktor internasional tidak bersikap lebih adil. Krisis tersebut direspon dengan suatu pola perdagangan bebas yang sama sekali tidak adil. Sebagai contoh dapat kita lihat bahwa 75% hasil perikanan di Asia justru diperuntukkan bagi konsumsi Jepang, AS, Eropa, dan Cina. Kebutuhan domestik harus dikorbankan demi kepentingan perdagangan internasional. Begitu pula yang terjadi dalam konteks perubahan iklim.

Putaran demi putaran perundingan perubahan iklim terus bergulir untuk menentukan berbagai kebijakan global untuk menghadapi perubahan iklim. Sudah 15 putaran resmi konferensi para pihak digulirkan semenjak tahun 1995, namun tidak terdapat solusi adil yang didapatkan. Jauh panggang dari api, putaran negosiasi tidak pernah bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Bahkan putaran negosiasi semakin menjauhi solusi adil dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di tingkat lokal. Dengan putaran perundingan yang tidak menunjukkan suatu titik terang, di tingkat Nasional berbagai masalah pengelolaan sumber daya alam dan keselamatan manusia juga tidak diselesaikan dengan segera.

Pembicaraan tentang perubahan iklim pada tahun ini akan menemui titik terpentingnya, COP 15 di Copenhagen pada

Desember ini. Perubahan iklim telah menjadi bukti dari kegagalan model pembangunan yang dilakukan selama ini. Namun solusi yang dibangun melalui UNFCCC tidak pernah bisa menjadi solusi ril atas penyelesaian permasalahan perubahan iklim. Tujuan awal pengurangan emisi secara global yang dimandatkan oleh UNFCCC menjadi terlupakan, dan mengarah kepada praktek bussines as usual. COP 15 harus menjadi pertemuan yang dapat mengarahkan dunia kembali kepada tujuan awal dari UNFCCC.

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam COP 15 di Copenhagen, perjuangan harus dipersiapkan sejak awal. Rangkaian pertemuan menuju Copenhagen telah diselenggarakan semenjak bulan Maret 2009, dan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada bulan Juni 2009 yang akan datang. Komitmen negara maju dalam memotong emisinya kembali dipertanyakan dan dibicarakan pada pertemuan tersebut. Sebagai negara yang termasuk rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia harus bisa mengarahkan pembicaraan negosiasi untuk tetap fokus kepada penurunan emisi secara ril dan memastikan tidak ada kenaikan iklim global diatas 2°C.

Penguluran atas komitmen tersebut akan berakhir katastropik, dan jelas akan merugikan Indonesia apalagi mengingat bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang berbentuk kepulauan. Skema penurunan emisi tersebut juga tidak seharusnya merugikan masyarakat yang akan terkena dampak secara langsung. Masyarakat sipil Indonesia tidak akan mentolerir skema-skema yang ditawarkan pada pertemuan tersebut. Sehingga tindakan yang konkrit tetap harus diambil saat ini, namun tetap menjamin hak masyarakat untuk tidak terlanggar.

Dengan semua proses yang telah bergulir semenjak COP 13 di Bali, masih banyak tantangan yang perlu di jawab. Selang 3 bulan setelah diselenggarakannya COP 13 di Bali pemerintah mengeluarkan kebijakan dua paket kebijakan sektor kehutanan yang cukup kontroversial. PP 2 tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan PP 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Kedua kebijakan ini menunjukkan salah arahnya pemerintah dalam melihat permasalahan perubahan iklim.

Komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim kembali dinyatakan dalam pidato kenegaraan pada kesempatan G-20 Summit di Pittsburgh beberapa waktu yang lalu. Penurunan emisi sebanyak 26% dari berbagai sektor sampai dengan tahun 2020 menjadi janji Pemerintahan SBY. Mencapai target tersebut tentu saja bukanlah hal yang mudah ketika melihat model pembangunan masih bersifat eksploitatif seperti saat ini.

Namun disamping komitmen yang sangat ambisius tersebut, hal yang paling penting adalah bagaimana bisa menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di Indonesia yang masih berlangsung hingga saat ini. Karena permasalahan secara tuntas permasalahan di tingkat nasional akan membawa Indonesia secara otomatis untuk dapat menurunkan emisinya. Akan tetapi arah pembangunan tidak dapat difokuskan kepada penurunan emisi, namun lebih kepada menjawab bagaimana keselamatan manusia dapat terjamin oleh negara, dan bagaimana pola produksi dan konsumsi dapat dibangun di dalam pola yang berkelanjutan. Menuju COP 15 Indonesia perlu untuk mengambil suatu langkah “gila” dalam perundingan. Karena memang pilihan yang ditawarkan juga tidaklah mudah.

Sekarang atau Mati..

Dengan gambaran-gambaran tersebut, maka dapat terlihat sikap yang seharusnya diambil oleh dunia internasional dalam perundingan perubahan iklim. Penundaan dari pengambilan sikap konkrit untuk mengurangi emisi akan sangat fatal dan mahal. Sampai pada putaran terakhir tidak terlihat adanya jalan keluar yang adil bagi negara berkembang. Ilusi dari mekanisme offset masih menjadi pilihan utama, dan secara otomatis menunjukkan keengganan negara industri untuk menurunkan tingkat emisinya secara ril.

Rekomendasi IPCC untuk memotong emisi negara industri sebesar 40% sampai tahun 2020 tidak mendapatkan prioritas bagi negara industri. Komitmen besar yang mereka tawarkan hanya sekedar ilusi yang tidak menyelesaikan masalah. Amerika Serikat dan Jepang menawarkan 80% pemotongan emisi sampai tahun 2050, Norwegia 40% sampai tahun 2020, sedangkan Uni Eropa menawarkan pemotongan emisi sebesar 80 - 95 % sampai tahun 2050. Namun semua tawaran tersebut tidak akan menyelesaikan masalah ketika pemotongan emisi tidak dilakukan secara domestik dan masih menggunakan mekanisme offset. Karbon tidak dijadikan suatu patokan dari kehancuran, namun hanya dijadikan nilai tukar baru bagi keuntungan kapital.

Suatu Ilustrasi
Mengapa OFFSET mutlak untuk ditolak*

Saya orang kaya di kompleks RT Maju Mundur. Lima tahun yang lalu cerobong asap rumah saya rusak. Asap kemudian menyebar ke kompleks satu RT sehingga membuat tetangga terganggu. Masalah tersebut lalu dibawa ke rapat RT Maju Mundur. Setelah didesak oleh berbagai pihak agar saya memperbaiki cerobong asap saya, saya lalu berargumen bahwa masalah asap di rumah saya agak serius karena kalau cerobongnya diperbaiki biayanya mahal dan renovasinya kompleks, bisa-bisa rumah mewah saya ikutan ambruk kalau diperbaiki secara serentak. Saya menguraikan semua angka dan materi yang akan dikeluarkan dengan menggunakan statistik yang saya lebih-lebihkan, karena saya tahu tetangga saya tidak paham.

Omongan yang dipoles muslihat tersebut rupanya “kena” juga oleh para tetangga. Tetangga kompleks memahami masalah saya, kemudian memberi toleransi agar diperbaiki secara bertahap. Intinya, asap yang mengganggu lingkungan sekitar rumah saya bisa dikurangi. Saya setuju. Namun asap tersebut rupanya makin menebal seiring dengan makin seringnya pesta mewah di rumah saya.

Namun, saya merasa sayang kalau cerobong saya diperbaiki karena strukturnya sudah bagus dan biayanya pun mahal. Maklum itu warisan keluarga yang antik dan unik. Tetangga makin terganggu dan protes, namun karena saya orang kaya untuk meredakan murka mereka saya mengusulkan tawaran seperti ini:

“Saya tidak usah mengurangi pesta dansa yang berujung pada memperbesarnya kepulan asap dari rumah saya tapi saya gantikan protes tetangga dengan membayar sejumlah uang. Jumlah tersebut akan ditambah dengan bantuan teknis. Misalnya, kalau ledeng mereka bocor nanti ada tukang yang perbaiki, listrik anjlok ada yang akan bantu, kalau ban sepeda anak mereka bocor saya akan suruh orang untuk membeli ban yang baru. Yang jelas semuanya akan diganti dengan bayaran dari uang saya yang masih tersimpan di bank.

Suara warga RT Maju Mundur yang awalnya bulat, ketika melihat uang maka menjadi pecah. Saya tahu, ada yang memang benar-benar butuh uang untuk memperbaiki banyak pipa air yang pecah dalam rumahnya. Biayanya mahal karena harus membongkar lantai, membeli pipa, semen, keramik baru, dst. Mereka menerima tawaran tersebut. Alhasil, saya masih bisa meneruskan kepulan asap di rumah saya, bahkan akhir-akhir ini karena pengeluaran saya cukup banyak untuk membantu warga yang setuju dengan tawaran saya, ada banyak pesta penerimaan rekan bisnis di rumah saya untuk meningkatkan sumber penghasilan. Sehingga, pengeluaran ke warga sekitar tidak lah seberapa dibanding dengan kontrak-kontrak bisnis baru. Saya pun semakin sering pesta dan kepulan asap dari rumah saya semakin menyebar kemana-mana. Para tetangga saya tidak akan protes. Toh recehan saya untuk menutupi mulut besar mereka sudah saya berikan rutin tiap bulan.

Memang enak menjadi orang kaya. Semua masalah bisa diatur dengan uang. Itulah prinsip utama offset. Kepulan asap saya stabil bahkan bisa bertambah asalkan saya memberikan sedikit kontribusi untuk memperbaiki rumah kumuh dan kumal dari tetangga saya. Mereka juga biasanya rada bloon. Jika dikipasi uang 5000 perak biasanya omongnya kencang, bernada tinggi. Kalau dinaikan jadi 20rb, suaranya agak menurun. Tambah lagi jadi 50rb, mereka sedikit tersenyum. Kalau jadi 100rb, mereka serempak tertawa terbahak-bahak.

Ah...tetangga saya yang bloon, mereka tidak tahu kepulan asap saya itu bisa membutakan mata anak-anak mereka, membuat atap dan besi rumah makin keropos dan akhirnya runtuh hanya dalam sekali gempa kecil atau angin ribut. Saya tidak bertanggung jawab untuk masalah-masalah itu karena perjanjian saya dengan mereka adalah membantu masalah-masalah yang bukan akibat kepulan asap saya, tapi membantu fasilitas yang rusak di rumah mereka semata-mata karena kedermawanan saya sebagai orang kaya kelas wahid di RT ini. Silakan mereka jadi gelandangan karena kehilangan rumah dan sumber daya. Bukan urusan saya. Malah buat saya enak, karena saya makin bebas hidup sendiri di RT ini dengan makin sering pesta dan bila perlu membuat asap dapur saya berlipat ganda.

*Bernardinus Steni, Peneliti HuMa

Posisi Masyarakat Sipil

Krisis pangan yang kian meluas dan membesar telah dialami oleh lebih dari 1 miliar penduduk bumi akibat ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam dalam skema WTO. Ironisnya, pemerintah Indonesia justru menempatkan upaya merespons dampak perubahan iklim dalam urutan ke-11. Dengan perkataan lain, pemerintah tak serius menyikapi perubahan iklim meski dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN PI) dan Buku Kuning Bappenas. Tabrakan kepentingan lintas-sektoral malah diperbesar dengan agenda utama meningkatkan pendapatan negara. Pada konteks inilah, DNPI mengalami kemandulan prestasi.

Berdasar pada kondisi di atas, setidaknya ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi (*non negotiable issues*). **Pertama**, Indonesia harus bisa memastikan dan memiliki sikap jelas terhadap hasil yang akan dicapai pada COP 15 UNFCCC. Di antara pilihan yang sulit, Indonesia harus berpegang pada prinsip “lebih baik tidak bersepakat daripada bersepakat dengan kesepakatan yang buruk”. Memang pilihan tersebut terasa sangat pesimistis, namun Indonesia sudah tidak boleh lagi tunduk pada kesesatan politik internasional yang berparadigma eksploitatif dan kapitalistik.

Kedua, pembenahan/kaji ulang berbagai kebijakan sektoral terkait pengelolaan sumber daya alam (pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, energi) di tingkat nasional mutlak untuk dilakukan. Apabila Indonesia tidak memiliki suatu landasan pijak yang kuat dan sinergis di tingkat nasional, maka dapat dipastikan kekacauan pengelolaan sumber daya alam dan kegagalan dari pola pembangunan akan terus berlanjut. Sehingga walaupun hal terburuk adalah tidak tercapainya kesepakatan di tingkat Internasional, paling tidak kita memiliki kejelasan kebijakan di tingkat nasional.

Ketiga, pemenuhan jaminan penuh dari negara atas hak dasar WNI terutama menyangkut keselamatan dan keberlanjutan hidup warga negara Indonesia terutama masyarakat rentan dan marjinal. Pemihakan pemerintah kepada masyarakat rentan yang hidup di seluruh penjuru Indonesia, harus menjadi prioritas. Tanpa hal tersebut masyarakat Indonesia akan terus dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah. Selama ini keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil terlihat masih sangat minim. Beberapa kasus di daerah menunjukkan hal tersebut, dan hal tersebut mutlak untuk segera diselesaikan.